



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
UPT. PERPUSTAKAAN

Jalan T. Nyak Arief, Kampus UNSYIAH, Darussalam – Banda Aceh, Tlp. (0651) 8012380, Kode Pos 23111
Home Page : <http://library.unsyiah.ac.id> Email: helpdesk.lib@unsyiah.ac.id

ELECTRONIC THESIS AND DISSERTATION UNSYIAH

TITLE

TINDAK PIDANA MENGEDARKAN OBAT MORFIN (DEXTROMETHORPHAN) (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KOTA BANDA ACEH)

ABSTRACT

TINDAK PIDANA MENGEDARKAN OBAT MORFIN (DEXTROMETHORPHAN)

(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh)

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

(iv,58),pp.,bibl.,tabl.

ABSTRAK

Imelda,
2017

Tarmizi, S.H., M.Hum.

Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 menyebutkan bahwa, “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Namun masih terjadinya peredaran obat morfin (dextromethorphan) di Kota Banda Aceh.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya peredaran obat morfin (dextromethorphan) di Kota Banda Aceh, serta untuk menjelaskan upaya dan hambatan yang ditemukan dalam menangani tindak pidana Mengedarkan obat morfin (dextromethorphan).

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara menggunakan metode penelitian hukum empiris atau metode penelitian lapangan (field research) untuk mengumpulkan data primer yang diperoleh dengan melakukan teknik pengumpulan data observasi, kuesioner, dan wawancara dengan responden dan informan, yang selanjutnya dijadikan alat analisis dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah diidentifikasi dalam rumusan permasalahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya peredaran obat morfin (dextromethorphan) di Kota Banda Aceh, dilatarbelakangi oleh kurangnya informasi mengenai larangan peredaran obat morfin (dextromethorphan), toko obat tidak berizin, adanya kesempatan dan keinginan, serta kurangnya kesadaran dan kepatuhan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya dan hambatan yang ditemukan dalam menangani tindak pidana menyalahgunakan obat morfin (dextromethorphan), dapat ditemukan dari segi pelaku usaha yang tidak taat hukum, fasilitas, sarana, dan, prasarana, serta kurangnya alokasi anggaran, sehingga dibutuhkan upaya perlindungan hukum dalam menangani tindak pidana Mengedarkan obat morfin (dextromethorphan) di Kota Banda Aceh.

Disarankan untuk melakukan penindakan dalam rangka menanggapi faktor penyebab penyebab terjadinya tindak pidana mengedarkan obat morfin (dextromethorphan), dengan meningkatkan fasilitas, sarana, dan prasarana, alokasi anggaran, serta penertiban toko obat berizin maupun tidak berizin dan melakukan upaya perlindungan hukum preventif, kuratif, rehabilitatif, dan upaya perlindungan hukum represif.